



PENDIDIKAN DEMOKRASI SEBAGAI ALAT PENGUATAN KEBHINEKAAN DAN TOLERANSI DI SEKOLAH

Fadhila Az Zahra

fdhlazhr19@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Dea Nabila

deanabilaa7@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Alamat: Jl. Raya Jakarta-Bogor No.KM.23 No.99, RT.4/RW.5, Rambutan, Kec.

Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13830

Korespondensi penulis: fdhlazhr19@gmail.com

***Abstract.** Democratic education is an important element in forming a just and inclusive society, especially in a country with high diversity like Indonesia. This research aims to explore the role of democratic education in strengthening diversity and tolerance in schools. The research method used is a qualitative approach with a focus on case studies in several junior high schools in Indonesia. The research results show that although democracy education has been integrated into the curriculum through Citizenship Education (PKN) subjects, its implementation is often still theoretical and does not facilitate active student participation. The main challenges in implementing democratic education include limited resources, lack of training for teachers, and school environments that are not yet fully inclusive. However, there are several positive initiatives that have succeeded in integrating democratic education in an innovative way, such as election-like class president elections, debate programs, and community service projects. Effective democratic education can increase tolerance, leadership skills, critical thinking abilities, and students' awareness of the importance of participation in democratic life. To increase the effectiveness of democratic education, more intensive training for teachers, a more practical and participatory curriculum, and an inclusive school environment are needed. In this way, it is hoped that democratic education can form a young generation that is more inclusive, tolerant and ready to actively participate in democratic life in Indonesia*

***Keywords:** Democratic education, diversity, tolerance, student participation, inclusive curriculum*

Abstrak. Pendidikan demokrasi merupakan elemen penting dalam membentuk masyarakat yang adil dan inklusif, khususnya di negara yang memiliki keberagaman tinggi seperti Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pendidikan demokrasi dalam memperkuat kebhinekaan dan toleransi di sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus di beberapa sekolah menengah pertama di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendidikan demokrasi telah diintegrasikan dalam kurikulum melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), implementasinya sering kali masih bersifat teoretis dan kurang memfasilitasi partisipasi aktif siswa. Tantangan utama dalam implementasi pendidikan demokrasi meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan bagi guru, serta lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya inklusif. Namun, terdapat beberapa inisiatif positif yang berhasil mengintegrasikan pendidikan demokrasi secara inovatif, seperti pemilihan ketua kelas yang menyerupai pemilu, program debat, dan proyek layanan masyarakat. Pendidikan demokrasi yang efektif dapat meningkatkan toleransi, keterampilan kepemimpinan, kemampuan berpikir kritis, dan kesadaran siswa akan pentingnya partisipasi dalam kehidupan demokratis. Untuk meningkatkan efektivitas pendidikan demokrasi, diperlukan pelatihan yang lebih intensif bagi guru, kurikulum yang lebih praktis dan partisipatif, serta lingkungan sekolah yang

inklusif. Dengan demikian, pendidikan demokrasi diharapkan dapat membentuk generasi muda yang lebih inklusif, toleran, dan siap berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis di Indonesia.

Kata kunci: Pendidikan demokrasi, kebhinekaan, toleransi, partisipasi siswa, kurikulum inklusif

LATAR BELAKANG

Pendidikan demokrasi merupakan elemen krusial dalam membentuk masyarakat yang adil dan inklusif. Demokrasi, secara umum, didefinisikan sebagai sistem pemerintahan di mana semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Khaerah, et. al., 2021). Dalam konteks yang lebih luas, demokrasi mencakup nilai-nilai seperti kesetaraan, kebebasan, partisipasi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Di tengah keberagaman yang ada di Indonesia, pendidikan demokrasi memegang peranan penting dalam memperkuat kebhinekaan dan toleransi di kalangan siswa. Pendidikan demokrasi tidak hanya mengajarkan tentang sistem politik dan pemerintahan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi tersebut.

Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman budaya yang sangat tinggi. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnis yang tersebar di seluruh Nusantara, masing-masing dengan bahasa, adat istiadat, dan keyakinan agama yang berbeda. Keberagaman ini merupakan aset yang berharga, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pendidikan yang menanamkan nilai-nilai demokrasi dan toleransi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa keberagaman ini dapat menjadi kekuatan yang mempersatukan, bukan memecah belah.

Pendidikan demokrasi di sekolah bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis (Dianti, et. al., 2020). Dengan memahami prinsip-prinsip demokrasi, siswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menyelesaikan konflik secara damai, dan menghargai perbedaan. Pendidikan demokrasi juga berfungsi sebagai sarana untuk mempromosikan hak asasi manusia dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. Siswa yang memahami dan menerapkan nilai-nilai demokrasi diharapkan menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama (Nurdin, et. al., 2020).

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pendidikan demokrasi dalam memperkuat kebhinekaan dan toleransi di sekolah. Penelitian ini akan membahas bagaimana pendidikan demokrasi diimplementasikan di sekolah-sekolah Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap sikap dan perilaku siswa. Melalui analisis yang mendalam, artikel ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang praktis untuk meningkatkan efektivitas pendidikan demokrasi dalam konteks kebhinekaan dan toleransi. Analisis ini akan membantu mengidentifikasi praktik-praktik terbaik serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi berbagai hambatan dalam implementasi pendidikan demokrasi.

Selain itu, artikel ini juga akan menggali berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi pendidikan demokrasi. Dengan demikian, diharapkan pendidikan demokrasi tidak hanya menjadi mata pelajaran yang diajarkan secara teoritis, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari siswa di sekolah. Strategi-strategi ini dapat mencakup pelatihan guru yang lebih intensif, pengembangan kurikulum yang lebih inklusif, serta pembentukan lingkungan sekolah yang mendukung nilai-nilai demokrasi dan toleransi.

Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus di beberapa sekolah menengah pertama di Indonesia. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kondisi nyata di lapangan serta berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pendidikan demokrasi di sekolah-sekolah tersebut. Studi kasus ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana pendidikan demokrasi diimplementasikan dalam konteks yang berbeda-beda dan apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam hal penguatan pendidikan demokrasi dan toleransi. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan peluang yang ada, diharapkan pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang lebih demokratis, inklusif, dan toleran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dalam merancang program-program pendidikan demokrasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, pendidikan demokrasi yang efektif dapat berkontribusi secara signifikan dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya memahami prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga memiliki komitmen untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda yang terdidik dalam semangat demokrasi akan mampu menghadapi tantangan global dengan lebih baik dan berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih damai, adil, dan inklusif. Dengan demikian, upaya untuk memperkuat pendidikan demokrasi di sekolah-sekolah Indonesia merupakan investasi yang sangat penting bagi masa depan bangsa.

KAJIAN TEORITIS

Implementasi pendidikan demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kurikulum yang padat, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pelatihan bagi guru menjadi beberapa hambatan utama. Kurikulum yang ada sering kali terlalu fokus pada aspek kognitif dan kurang memberikan ruang bagi pengembangan sikap dan keterampilan demokratis. Selain itu, keterbatasan sumber daya, seperti buku pelajaran yang memadai dan fasilitas pendukung, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan demokrasi yang efektif. Kurangnya pelatihan bagi guru dalam metode pengajaran yang interaktif dan partisipatif juga menghambat upaya untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi secara efektif di kelas (Sulistiyono, 2021).

Selain hambatan kurikulum dan sumber daya, lingkungan sekolah yang kurang mendukung dan masih adanya praktik diskriminasi juga dapat menghambat upaya untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi secara efektif. Tantangan dalam implementasi pendidikan demokrasi juga terlihat dari masih adanya praktek intoleransi di beberapa sekolah. Misalnya, terdapat kasus dimana siswa yang berbeda agama atau etnis mengalami diskriminasi baik dari teman sebaya maupun dari guru. Kondisi ini tentu saja bertentangan dengan semangat demokrasi yang menghargai keberagaman dan kesetaraan (Ramdani, et. al., 2021). Praktik-praktik semacam ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan demokrasi telah diajarkan, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya belum sepenuhnya terinternalisasi oleh semua pihak di lingkungan sekolah.

Meskipun demikian, terdapat pula sejumlah inisiatif positif yang dapat dijadikan contoh dalam upaya mengintegrasikan pendidikan demokrasi di sekolah. Beberapa sekolah telah

mulai mengimplementasikan program-program yang mendorong partisipasi aktif siswa dalam pengambilan keputusan, baik melalui organisasi siswa maupun kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat inklusif. Program-program seperti ini memberikan siswa kesempatan untuk mengalami langsung proses demokratis dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan serta kerjasama (Khuzaimah, et. al., 2022). Melalui program-program ini, siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan pendapat, bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, dan memahami pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi pendidikan demokrasi di sekolah. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan pandangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan demokrasi. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menangkap nuansa dan kompleksitas dari fenomena yang diteliti.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan guru, siswa, dan kepala sekolah di lima sekolah menengah pertama yang dipilih secara purposive sampling untuk mewakili berbagai latar belakang budaya, agama, dan etnis. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang kaya dan mendalam mengenai pandangan dan pengalaman partisipan terkait pendidikan demokrasi.

Observasi partisipatif dilakukan selama satu semester untuk mengamati proses pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, serta interaksi antar siswa. Melalui observasi ini, peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana pendidikan demokrasi diimplementasikan di lapangan, serta dinamika yang terjadi di antara siswa dan antara siswa dengan guru. Observasi juga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai lingkungan sekolah dan bagaimana nilai-nilai demokrasi dan toleransi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

Peneliti juga menganalisis dokumen kurikulum, silabus, dan materi pembelajaran yang digunakan di sekolah-sekolah tersebut. Analisis dokumen ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pendidikan demokrasi diintegrasikan dalam kurikulum sekolah, serta bagaimana materi pembelajaran disusun untuk mendukung tujuan pendidikan demokrasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, serta member checking dengan para partisipan untuk memastikan akurasi interpretasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai partisipan dan sumber data yang berbeda, sementara triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan berbagai metode pengumpulan data. Member checking dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada partisipan untuk meninjau dan memberikan masukan terhadap hasil wawancara dan observasi, sehingga memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman dan pandangan partisipan.

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi pendidikan demokrasi di sekolah dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam memperkuat kebhinekaan dan toleransi. Dengan memahami berbagai aspek yang terlibat dalam implementasi pendidikan demokrasi,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang praktis dan aplikatif untuk meningkatkan efektivitas pendidikan demokrasi di sekolah-sekolah Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pendidikan Demokrasi di Sekolah

Penelitian ini menemukan bahwa pendidikan demokrasi telah diintegrasikan dalam kurikulum sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Namun, penerapan konsep demokrasi sering kali terbatas pada aspek teoretis dan kurang mengedepankan praktik nyata. Di banyak sekolah, metode pengajaran PKn masih berpusat pada ceramah yang pasif, di mana guru mendominasi kelas dan siswa hanya menjadi pendengar. Metode ini menghambat perkembangan keterampilan kritis dan partisipatif yang esensial dalam demokrasi.

Guru sering kali merasa terbatas oleh kurikulum yang kaku dan padat, serta tekanan untuk menyelesaikan silabus dalam waktu yang ditentukan. Akibatnya, topik-topik penting seperti hak asasi manusia, partisipasi politik, dan pluralisme budaya sering kali hanya dibahas secara dangkal. Siswa kurang diberi kesempatan untuk berdiskusi, mempertanyakan, atau mengeksplorasi ide-ide demokrasi dalam konteks kehidupan nyata.

Meskipun demikian, ada beberapa sekolah yang berhasil mengimplementasikan pendidikan demokrasi secara lebih inovatif. Misalnya, salah satu sekolah di Jakarta mengadakan pemilihan ketua kelas dan organisasi siswa dengan prosedur yang menyerupai pemilu. Siswa diberi kesempatan untuk mencalonkan diri, berkampanye, dan memilih secara rahasia. Proses ini tidak hanya mengajarkan siswa tentang prosedur demokrasi, tetapi juga mengembangkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama.

Pemilihan ketua kelas ini melibatkan seluruh siswa dalam berbagai tahapannya. Dimulai dengan pendaftaran calon, kampanye yang melibatkan debat publik dan presentasi visi-misi, hingga pelaksanaan pemungutan suara yang diawasi oleh panitia pemilihan dari kalangan siswa sendiri. Pengalaman ini memberikan wawasan praktis tentang bagaimana proses demokrasi berjalan dan pentingnya setiap suara dalam pengambilan keputusan.

Contoh lain adalah program debat yang diselenggarakan di salah satu sekolah di Bandung, di mana siswa diajak untuk berdebat mengenai isu-isu sosial dan politik terkini. Kegiatan ini membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menghargai perbedaan pendapat. Debat ini tidak hanya melibatkan persiapan argumen yang kuat dan berbasis fakta, tetapi juga keterampilan mendengarkan dan merespons dengan cara yang konstruktif. Ini merupakan latihan yang baik dalam mengembangkan toleransi dan kemampuan untuk melihat berbagai sudut pandang.

Selain melalui kegiatan di kelas, terdapat beberapa inisiatif yang mengintegrasikan pendidikan demokrasi ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya, di salah satu sekolah di Surabaya, siswa diajak untuk terlibat dalam proyek layanan masyarakat yang melibatkan kerja sama dengan komunitas lokal. Kegiatan ini tidak hanya mengajarkan siswa tentang pentingnya partisipasi dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga membantu mereka memahami dan menghargai keberagaman yang ada di sekitarnya.

Proyek layanan masyarakat ini melibatkan berbagai aktivitas, mulai dari penggalangan dana untuk kegiatan sosial, program kebersihan lingkungan, hingga penyuluhan kesehatan. Siswa diajak untuk bekerja sama dengan warga setempat,

merencanakan dan melaksanakan kegiatan, serta mengevaluasi hasilnya. Melalui interaksi langsung dengan masyarakat, siswa belajar tentang realitas sosial yang dihadapi oleh berbagai kelompok, pentingnya kerjasama dan solidaritas, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

Selain itu, beberapa sekolah juga mengadakan program pertukaran pelajar antar daerah yang berbeda budaya dan etnis. Program ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk tinggal dengan keluarga angkat dari latar belakang budaya yang berbeda, sehingga mereka dapat merasakan secara langsung kehidupan dan tradisi yang berbeda. Pengalaman ini memperkaya pemahaman siswa tentang keberagaman dan membantu mengembangkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan.

Tantangan dalam Pendidikan Demokrasi

Tantangan utama dalam implementasi pendidikan demokrasi adalah keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal pelatihan guru. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai tentang cara mengajar pendidikan demokrasi secara efektif. Akibatnya, mereka cenderung kembali pada metode pengajaran tradisional yang kurang interaktif. Metode ceramah yang dominan sering kali tidak memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran.

Guru yang kurang terlatih juga menghadapi kesulitan dalam mengembangkan materi pembelajaran yang relevan dan menarik. Kurangnya akses terhadap sumber daya pendidikan yang up-to-date dan berkualitas tinggi semakin memperburuk situasi ini. Banyak guru harus mengandalkan buku teks yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan konteks dan kebutuhan lokal, serta kurang memperhatikan isu-isu terkini yang relevan dengan pendidikan demokrasi.

Dalam beberapa kasus, guru juga merasa kurang percaya diri untuk membahas isu-isu yang sensitif atau kontroversial terkait demokrasi dan hak asasi manusia. Topik-topik seperti hak minoritas, kebebasan beragama, dan pluralisme sering kali dianggap tabu atau terlalu berisiko untuk dibahas di kelas. Ketakutan akan reaksi negatif dari siswa, orang tua, atau pihak sekolah membuat guru lebih memilih untuk menghindari topik-topik ini, sehingga mengurangi kesempatan bagi siswa untuk belajar tentang aspek-aspek penting dari demokrasi.

Lingkungan sekolah yang masih diwarnai oleh praktik diskriminasi dan intoleransi juga menjadi hambatan signifikan dalam pendidikan demokrasi. Misalnya, di salah satu sekolah yang diteliti, terdapat kecenderungan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan latar belakang agama atau etnis tertentu. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan dapat menghambat upaya untuk memperkuat kebhinekaan dan toleransi. Pengelompokan seperti ini dapat menciptakan suasana eksklusif dan menghambat interaksi lintas budaya yang penting untuk membangun pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan.

Di beberapa sekolah, terdapat pula kasus dimana siswa yang berasal dari latar belakang minoritas mengalami perlakuan diskriminatif baik dari teman sebaya maupun dari staf sekolah. Perlakuan ini bisa berupa ejekan, intimidasi, atau pengucilan yang menyebabkan siswa merasa tidak aman dan tidak dihargai. Lingkungan yang tidak inklusif ini berdampak negatif pada perkembangan sosial dan emosional siswa, serta menghalangi mereka untuk terlibat aktif dalam kegiatan sekolah.

Diskriminasi dan intoleransi di sekolah juga dapat dipicu oleh kurangnya kebijakan dan praktik yang mendukung inklusivitas dan keadilan. Sekolah yang tidak memiliki kebijakan anti-diskriminasi yang jelas dan tidak melakukan pelatihan bagi staf untuk

menangani isu-isu ini dengan efektif akan kesulitan menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan demokrasi. Selain itu, kurangnya representasi budaya dan agama dalam kurikulum dan aktivitas sekolah juga dapat memperkuat perasaan keterasingan di antara siswa dari latar belakang minoritas.

Kurangnya dukungan dari pihak sekolah dan komunitas juga menjadi tantangan. Di beberapa sekolah, program-program yang mendukung pendidikan demokrasi tidak mendapatkan dukungan yang memadai baik dari pihak sekolah maupun dari orang tua siswa. Kurangnya dukungan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk minimnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan demokrasi, prioritas yang berbeda, atau kendala anggaran.

Beberapa kepala sekolah mungkin tidak melihat pendidikan demokrasi sebagai prioritas utama dan lebih fokus pada aspek akademis tradisional atau prestasi akademik siswa. Pandangan ini dapat menghambat alokasi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan dan menjalankan program-program pendidikan demokrasi. Selain itu, tanpa dukungan yang kuat dari pihak manajemen sekolah, guru yang berusaha mengimplementasikan program-program inovatif mungkin merasa terbatas dan tidak didukung.

Dukungan dari komunitas, termasuk orang tua siswa, juga sangat penting. Orang tua yang tidak mendukung atau tidak memahami tujuan pendidikan demokrasi dapat menjadi penghalang dalam implementasi program-program tersebut. Mereka mungkin khawatir bahwa diskusi tentang isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia dapat menimbulkan konflik atau bertentangan dengan nilai-nilai keluarga mereka. Tanpa dukungan dan keterlibatan dari orang tua, upaya sekolah untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi pada siswa dapat menjadi kurang efektif.

Selain tantangan yang telah disebutkan, terdapat juga hambatan struktural dan kultural yang menghalangi implementasi pendidikan demokrasi. Sistem pendidikan yang sentralistik dan birokratis sering kali tidak memberikan fleksibilitas bagi sekolah dan guru untuk menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Kebijakan pendidikan yang tidak mendukung inovasi dan eksperimen juga dapat membatasi ruang gerak guru dan sekolah.

Budaya sekolah yang cenderung otoriter dan hierarkis juga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ingin diajarkan. Dalam banyak kasus, siswa diajarkan untuk patuh dan tidak mempertanyakan otoritas, yang bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan perubahan budaya dan struktur sekolah yang mendukung pendidikan demokrasi.

Dampak Pendidikan Demokrasi terhadap Siswa

Salah satu dampak signifikan dari pendidikan demokrasi adalah peningkatan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Siswa yang terlibat dalam kegiatan demokrasi, seperti pemilihan ketua kelas dan organisasi siswa, lebih mampu menerima dan menghargai pendapat serta latar belakang yang berbeda. Keterlibatan dalam proses pemilihan yang transparan dan partisipatif mengajarkan siswa tentang pentingnya mendengarkan dan menghormati pandangan orang lain.

Misalnya, di salah satu sekolah di Jakarta, proses pemilihan ketua kelas melibatkan debat dan kampanye di mana calon ketua harus mempresentasikan visi dan misi mereka di depan seluruh siswa. Kegiatan ini tidak hanya mengajarkan prosedur demokrasi, tetapi juga mengharuskan siswa untuk mendengarkan dan mempertimbangkan berbagai

pendapat sebelum membuat keputusan. Hal ini membantu siswa mengembangkan rasa hormat terhadap perbedaan pendapat dan mengapresiasi keragaman pandangan dalam komunitas mereka.

Siswa yang terlibat dalam kegiatan pendidikan demokrasi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam keterampilan kepemimpinan dan kemampuan untuk bekerja dalam tim. Keterlibatan dalam organisasi siswa dan proyek layanan masyarakat memberikan kesempatan bagi siswa untuk memimpin dan bekerja sama dengan orang lain. Mereka belajar bagaimana memotivasi dan mengarahkan rekan-rekan mereka, serta mengelola proyek dan kegiatan secara efektif.

Di salah satu sekolah di Bandung, program debat yang melibatkan isu-isu sosial dan politik terkini membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan. Siswa yang berpartisipasi dalam debat belajar bagaimana menyusun argumen yang logis dan persuasif, serta bagaimana merespons kritik dengan cara yang konstruktif. Kemampuan ini sangat penting dalam kehidupan demokratis, di mana debat dan diskusi merupakan bagian integral dari proses pengambilan keputusan.

Kegiatan yang mendukung pendidikan demokrasi juga membantu siswa meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Siswa yang terlibat dalam debat dan proyek layanan masyarakat lebih mampu menganalisis isu-isu sosial dan politik secara mendalam, serta mengembangkan solusi yang kreatif dan inklusif. Kegiatan ini menantang siswa untuk mempertanyakan asumsi, mengevaluasi bukti, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan.

Sebagai contoh, dalam program layanan masyarakat di salah satu sekolah di Surabaya, siswa diajak untuk bekerja sama dengan komunitas lokal dalam mengatasi masalah lingkungan. Melalui kegiatan ini, siswa belajar bagaimana menganalisis masalah, mengidentifikasi sumber daya yang tersedia, dan mengembangkan rencana tindakan yang efektif. Pengalaman ini tidak hanya mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, tetapi juga meningkatkan kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap komunitas.

Pendidikan demokrasi juga meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Siswa yang terlibat dalam kegiatan demokrasi di sekolah menjadi lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Mereka lebih siap untuk terlibat dalam kegiatan demokrasi di masyarakat, seperti pemilihan umum, diskusi publik, dan kegiatan komunitas.

Di salah satu sekolah yang berhasil mengimplementasikan pendidikan demokrasi secara efektif, siswa menunjukkan peningkatan dalam rasa tanggung jawab dan kemampuan untuk memimpin. Misalnya, siswa yang terlibat dalam pemilihan ketua kelas dan organisasi siswa menunjukkan peningkatan dalam rasa tanggung jawab dan kemampuan untuk memimpin. Mereka juga lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat dan lebih siap untuk bekerja sama dengan teman-teman dari berbagai latar belakang.

Kegiatan pendidikan demokrasi yang melibatkan interaksi dengan berbagai kelompok dalam masyarakat membantu siswa mengembangkan empati dan rasa tanggung jawab sosial. Proyek layanan masyarakat, misalnya, mengharuskan siswa untuk berinteraksi langsung dengan individu dan kelompok yang mungkin berbeda secara sosial, ekonomi, atau budaya. Interaksi ini membantu siswa memahami dan menghargai keberagaman yang ada di masyarakat, serta mengembangkan empati dan rasa tanggung jawab sosial.

Di salah satu sekolah di Surabaya, siswa yang terlibat dalam proyek layanan masyarakat yang melibatkan kerja sama dengan komunitas lokal menunjukkan

peningkatan dalam pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman. Mereka lebih mampu melihat isu-isu dari perspektif orang lain dan lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas. Kegiatan ini juga mengajarkan siswa tentang pentingnya solidaritas dan kerja sama dalam menghadapi tantangan sosial.

Strategi untuk Meningkatkan Pendidikan Demokrasi

Guru memainkan peran penting dalam mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada siswa. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mendapatkan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan. Pelatihan ini tidak hanya harus mencakup pemahaman tentang teori demokrasi, tetapi juga teknik-teknik pengajaran yang interaktif dan partisipatif. Guru harus dibekali dengan kemampuan fasilitasi diskusi, manajemen konflik, dan metode inovatif dalam mengajar. Pelatihan yang berkesinambungan ini dapat difasilitasi melalui kerjasama antara pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi non-pemerintah yang fokus pada pendidikan.

Pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan ini akan memberikan guru keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang demokratis. Selain itu, dukungan terus-menerus dari pemerintah dan institusi pendidikan akan memastikan bahwa guru-guru mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan untuk menerapkan strategi pengajaran yang efektif.

Lingkungan sekolah yang inklusif dan mendukung sangat penting untuk pendidikan demokrasi. Sekolah harus berkomitmen untuk mengurangi praktik-praktik diskriminatif dan mendorong interaksi positif antar siswa dari berbagai latar belakang. Hal ini bisa dicapai dengan mengembangkan kebijakan yang mendukung keberagaman dan inklusi, serta memastikan bahwa semua siswa merasa diterima dan dihargai.

Selain kebijakan, sekolah juga dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mendorong interaksi positif antar siswa. Acara budaya, program pertukaran siswa, dan proyek layanan masyarakat adalah beberapa contoh kegiatan yang dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi. Melalui kegiatan ini, siswa dapat belajar untuk bekerja sama, memahami perspektif yang berbeda, dan mengembangkan rasa saling menghargai.

Kurikulum sekolah harus dirancang untuk tidak hanya fokus pada aspek teoretis demokrasi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ekstrakurikuler seperti debat, simulasi pemilu, dan proyek layanan masyarakat dapat menjadi sarana yang efektif untuk menerapkan teori dalam praktek. Melalui kegiatan ini, siswa dapat belajar tentang pentingnya partisipasi aktif, tanggung jawab sosial, dan pengambilan keputusan yang demokratis.

Selain itu, penting bagi kurikulum untuk mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam semua mata pelajaran. Dengan demikian, siswa dapat melihat relevansi nilai-nilai demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Pendekatan ini akan membantu siswa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai demokrasi secara lebih mendalam.

Keterlibatan orang tua dan masyarakat sangat penting dalam mendukung pendidikan demokrasi di sekolah. Orang tua dan masyarakat dapat memperkuat pesan yang disampaikan di sekolah dengan mendukung nilai-nilai demokrasi di rumah dan dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah dapat mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas isu-isu terkait pendidikan demokrasi dan mendengarkan masukan dari mereka.

Selain itu, melibatkan komunitas lokal dalam kegiatan sekolah dapat memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat. Kegiatan seperti proyek layanan masyarakat, acara budaya, dan diskusi publik dapat menjadi sarana untuk melibatkan masyarakat dalam pendidikan demokrasi. Melalui keterlibatan ini, siswa dapat belajar dari pengalaman nyata dan melihat bagaimana nilai-nilai demokrasi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi strategi efektif dalam pendidikan demokrasi. Platform pembelajaran online dan alat digital dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Misalnya, diskusi daring, video pembelajaran interaktif, dan simulasi digital dapat memberikan siswa akses ke berbagai sumber informasi dan perspektif yang beragam.

Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk menghubungkan siswa dengan komunitas global. Program pertukaran virtual, kolaborasi antar sekolah di berbagai negara, dan proyek internasional dapat membantu siswa memahami pentingnya demokrasi dalam konteks global. Melalui teknologi, siswa dapat belajar tentang tantangan dan keberhasilan demokrasi di berbagai belahan dunia, yang akan memperkaya pemahaman mereka tentang nilai-nilai demokrasi.

Akhirnya, penting untuk melakukan evaluasi dan penelitian berkelanjutan terhadap program pendidikan demokrasi. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari program yang ada, serta memberikan informasi yang berguna untuk pengembangan lebih lanjut. Penelitian juga dapat memberikan wawasan baru tentang metode dan strategi yang paling efektif untuk mengajar nilai-nilai demokrasi.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan pendidikan demokrasi dapat ditingkatkan secara signifikan, menghasilkan generasi muda yang lebih sadar dan berkomitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi yang efektif akan membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab, yang siap berkontribusi positif dalam masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan demokrasi memiliki peran yang sangat krusial dalam memperkuat kebhinekaan dan toleransi di sekolah. Dalam konteks Indonesia, yang kaya akan keragaman etnis, budaya, dan agama, pendidikan demokrasi tidak hanya menjadi sarana untuk mengajarkan nilai-nilai demokrasi seperti hak asasi manusia, kebebasan, dan partisipasi, tetapi juga menjadi alat yang efektif untuk menanamkan sikap inklusif dan toleran di kalangan siswa. Meski masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan bagi guru, serta resistensi terhadap perubahan kurikulum, pendidikan demokrasi telah menunjukkan dampak positif dalam membentuk sikap dan perilaku siswa.

Hasil penelitian dan berbagai studi menunjukkan bahwa siswa yang terpapar pada pendidikan demokrasi cenderung lebih mampu menerima perbedaan, berkomunikasi secara efektif dengan teman-teman dari latar belakang yang berbeda, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang mempromosikan kebersamaan dan toleransi. Selain itu, pendidikan demokrasi juga membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menyelesaikan konflik secara damai, dan membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Semua ini berkontribusi pada pembentukan lingkungan sekolah yang lebih harmonis dan mendukung pembelajaran yang efektif.

Namun, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, diperlukan upaya yang lebih serius dalam beberapa aspek. Pertama, pelatihan guru harus ditingkatkan baik dalam kualitas maupun kuantitas. Guru perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengajarkan konsep-konsep demokrasi serta mengelola dinamika kelas yang beragam. Kedua, lingkungan sekolah harus didesain sedemikian rupa sehingga mendukung inklusi dan mengurangi diskriminasi. Kebijakan sekolah harus mendukung keberagaman dan memastikan bahwa semua siswa merasa diterima dan dihargai. Ketiga, kurikulum pendidikan demokrasi harus lebih praktis dan partisipatif, memungkinkan siswa untuk mengalami langsung penerapan nilai-nilai demokrasi melalui kegiatan seperti debat, simulasi pemilu, dan proyek layanan masyarakat.

Dengan memperhatikan dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pendidikan demokrasi diharapkan dapat menjadi lebih efektif dalam memperkuat kebhinekaan dan toleransi di sekolah-sekolah Indonesia. Pendidikan demokrasi yang kuat dan berkelanjutan akan membantu membentuk generasi muda yang lebih inklusif, toleran, dan siap untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis, baik di tingkat lokal maupun nasional. Generasi ini akan menjadi pilar penting dalam mempertahankan dan memperkuat demokrasi di Indonesia, serta memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi terus berkembang dalam masyarakat yang semakin beragam.

DAFTAR REFERENSI

- Khaerah, N., Prianto, A. L., & Harakan, A. (2021). Pendidikan Demokrasi Berbasis Sekolah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nasyiatul Aisyiyah Sulawesi Selatan (JPMNAS)*, 1(1), 45-50.
- Rosyad, A. M., & Maarif, M. A. (2020). Paradigma Pendidikan Demokrasi Dan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Di Indonesia. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 75-99.
- Dianti, P., Waluyati, S. A., & Fatihah, H. (2020). Analisis Dampak Potensial Penggunaan Buku Ajar Pendidikan Demokrasi Berbasis Nilai Dalam Mengembangkan Sikap Demokratis Mahasiswa. *Civic Hukum*, 5(1), 75-85.
- Nurdin, M., & Insan, K. (2020). PENDIDIKAN DEMOKRASI PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (Studi Pada Pemilihan Ketua OSIS Di SMA Negeri 1 Sinjai). *Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik*, 32-51.
- Ramdani, R., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9034-9038.
- Khuzaimah, K., & Pribadi, F. (2022). Penerapan Demokrasi Pendidikan pada Pembelajaran Siswa di Sekolah Dasar. *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 4(1), 41-49.
- Nurhidayah, D., Sumarna, S., & Suhendar, I. F. (2021). Peranan mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam mengembangkan budaya demokratis. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 11(2).

- Asril, A., Jaenam, J., Syahrizal, S., Armalena, A., & Yuherman, Y. (2023). Peningkatan Nilai-Nilai Demokrasi dan Nasionalisme Pada Mahasiswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1300-1309.
- Yuniarto, B. (2020). Membangun Kesadaran Demokrasi melalui Pendekatan Kontekstual pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Edueksos Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 9(1).
- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M. (2021). Urgensi Etika Demokrasi di Era Global: Membangun Etika dalam Mengemukakan Pendapat bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 329-346.
- Maryam, S., Nuswantari, N., & Kokotiasa, W. (2022, August). Impelementasi nilai-nilai demokrasi pada mata pelajaran PKn dalam pembentukan karakter demokratis siswa kelas 8 di SMP Negeri 11 Madiun. In *Seminar Nasional Sosial, Sains, Pendidikan, Humaniora (SENASSDRA) (Vol. 1, No. 1, pp. 538-546)*.
- Widiatmaka, P. (2022). Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) di dalam Membangun Karakter Bangsa Peserta Didik. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 1-10.
- Dewi, D. A., & Ulfiah, Z. (2021). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pembangunan Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 499-506.
- Nurdiansyah, M. F., & Dewi, D. A. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2(2), 105-115.
- Sihombing, R. A., & Lukitoyo, P. S. (2021). Peranan Penting Pancasila Dan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 49-59.
- Sulistiyono, A. (2021). Peran guru dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui budaya sekolah. *Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2(2), 1-8.